

KEMISKINAN DAN KEUANGAN MIKRO

POVERTY AND MICROFINANCE

Ety Rahayu

Pengajar dan Peneliti Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI
Kampus FISIP UI, Depok
E-mail: ety_rahayu@yahoo.com

Abstract

Poverty is a global problem faced by countries in the world, including Indonesia. Various efforts were made to overcome this problem of poverty. One of the recommended efforts in various literatures is through microfinance. Microfinance has been recognized by many as a reliable strategy to alleviate poverty. Beginning with grameen bank program by Prof. Yunus in Bangladesh, followed by similar programs in other countries, the program has succeeded in increasing the income of the poor. The results of research in several countries show that microfinance has been successful in increasing the income of the poor. Although there are studies that show failure, research that shows the success of microfinance in poverty alleviation is still more than the research that shows failure. This proves that microfinance is indeed a reliable poverty reduction effort.

Keywords: poverty, microfinance, microcredit, empowerment

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Salah satu upaya yang dianjurkan di berbagai literature yaitu melalui keuangan mikro (*microfinance*). Keuangan mikro telah diakui oleh banyak pihak sebagai strategi yang bisa diandalkan untuk mengentaskan kemiskinan. Diawali dengan program Grameen Bank oleh Prof. Yunus di Bangladesh, kemudian diikuti oleh program sejenis di Negara lain, program ini berhasil meningkatkan penghasilan orang miskin. Hasil penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa keuangan mikro ternyata berhasil meningkatkan penghasilan orang miskin. Meskipun ada penelitian yang menunjukkan kegagalan, namun penelitian yang menunjukkan keberhasilan keuangan mikro dalam mengentaskan kemiskinan itu masih lebih banyak dibandingkan dengan penelitian yang menunjukkan kegagalan. Hal ini membuktikan bahwa keuangan mikro memang merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat diandalkan.

Kata kunci: kemiskinan, keuangan mikro, kredit mikro, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang masih menghantui Negara-negara di dunia. Di Indonesia, meskipun jumlah penduduk miskin selama tiga tahun terakhir ini cenderung menurun, namun%tasenyanya masih di atas 10% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Berikut angka kemiskinan di Indonesia selama tahun 2015-2017.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia selama Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	%tase
Maret 2015	28,59 juta	11,22
September 2015	28,51 juta	11,13
Maret 2016	28,01 juta	10,86
September 2016	27,76 juta	10,70
Maret 2017	27,77 juta	10,64
September 2017	26,58 juta	10,22

Sumber: Badan Pusat Statistik

Melihat angka kemiskinan yang masih bertengger di atas 10% sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas, tentunya diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.

Chowa dan kawan-kawan dalam Weil (2013: 616-617) mengemukakan bahwa untuk mengurangi kemiskinan global ada 3 kegiatan investasi yang dapat dilakukan: 1) program-program *social protection* atau *social safety net*, termasuk *conditional* ataupun *unconditional cash transfer* bagi orang miskin; 2) program-program *asset-building* atau *match-savings*, yang mendorong individu ataupun rumah tangga berpenghasilan rendah untuk menabung dan memiliki asset, seperti rumah, usaha, pendidikan, atau menabung untuk pensiun; 3) *microfinance*, atau penyediaan pelayanan keuangan bagi individu atau rumah tangga yang berpenghasilan rendah, yang secara tradisional kekurangan akses terhadap bank ataupun pelayanan lain yang terkait.

Sementara itu menurut Ife, upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan mengembangkan pendekatan alternative yang berusaha untuk merelokasi aktivitas ekonomi di dalam masyarakat, bekerja kearah kepentingan masyarakat, merevitalisasi masyarakat lokal dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendekatan alternative disini disebut sebagai pengembangan ekonomi masyarakat (*community economic development*). (Ife, 2013: 221) Pengembangan ekonomi masyarakat ada berbagai bentuk, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, pendekatan yang lebih konservatif, yang berusaha mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat dalam parameter konvensional; dan kedua, pendekatan yang lebih radikal, yaitu berusaha mengembangkan ekonomi alternative berbasis masyarakat (*alternative community-based economics*). Salah satu bentuk ekonomi

alternative berbasis masyarakat ini adalah *microfinance* dan *microcredit*. (Ife, 2013: 221-228)

Dari pendapatnya Chowa dan Ife di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan adalah *microfinance* atau keuangan mikro. Sehubungan dengan itu maka artikel ini berusaha untuk mengkaji tentang kemiskinan, dan keuangan mikro sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Kajian ini menggunakan metode studi literature dari berbagai sumber. Dengan kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang keuangan mikro sebagai salah satu upaya yang penting dalam penanggulangan kemiskinan.

PEMBAHASAN

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep yang kompleks dan multi interpretasi. Ini sejalan dengan pendapatnya Lister (2004: 3) bahwa tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan yang berdiri diluar sejarah dan budaya. Hal ini dikarenakan konsep kemiskinan merupakan konstruksi dari masyarakat tertentu. Bahkan kelompok yang berbeda didalam masyarakat mungkin mengkonstruksikan kemiskinan dengan cara yang berbeda. Ada yang memandang kemiskinan sebagai konsep ekonomi, ada juga yang memandangnya sebagai konsep politik. Ortodoksi neo-klasik cenderung memandang kemiskinan sebagai konsep ekonomi, karena itu pemecahan masalah kemiskinanpun berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi. (Serr, 2006: 50)

Lister termasuk yang memandang kemiskinan sebagai konsep politik. Menurut Lister (2004: 3), karena kewajiban moral dari kemiskinan dan implikasinya terhadap distribusi sumber-sumber di dalam dan di

antara masyarakat, kemiskinan merupakan konsep politik. Penekanannya pada kondisi-kondisi structural sosial-ekonomi, relasi kekuasaan, serta berbagai perilaku budaya dan individu; dan kebijakan yang dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan mencerminkan konseptualisasi yang dominan.

Terkait dengan definisi kemiskinan, ada berbagai definisi kemiskinan. Salah satunya adalah yang dikembangkan oleh Charles Booth dan Seebohm Rowntree, pendiri penelitian kemiskinan modern, yang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mendefinisikan kemiskinan sebagai kurang cukupnya uang untuk memenuhi kebutuhan fisik yang mendasar. Sebagaimana dikemukakan Charles Booth dan Seebohm Rowntree dalam Lister (2004: 20-21) bahwa kemiskinan merupakan *“lacking sufficient money to meet basic needs”*. Jadi kemiskinan didefinisikan dari segi kelangsungan hidup; lebih sering mengacu pada subsisten; terkait dengan standar dasar kapasitas fisik yang diperlukan untuk produksi pekerjaan yang dibayar dan reproduksi melahirkan dan mengasuh anak. Nutrisi merupakan hal yang sentral dalam definisi tersebut, dimana *‘an absolute standard means one defined by reference to the actual needs of the poor and not by reference to the expenditure of those who are not poor. A family is poor if it cannot afford to eat’*. Dari pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa standar mutlak berarti kemiskinan didefinisikan dengan mengacu pada kebutuhan aktual masyarakat miskin dan tidak dengan mengacu pada pengeluaran mereka yang tidak miskin. Sebuah keluarga dikatakan miskin jika mereka tidak mampu untuk makan (Joseph dan Sumption dalam Lister, 2004: 20-21)

Definisi kemiskinan di atas tampaknya mengarah pada apa yang disebut dengan ‘kemiskinan absolut’. Secara historis,

model kemiskinan absolute sebagaimana dikemukakan oleh Charles Booth dan Seebohm Rowntree di atas didasarkan pada istilah *subsistence* dan mengasumsikan *standard universal*; dimana seseorang dikatakan miskin apabila ia tidak memilikipersyaratan minimum untuk mempertahankan hidup seperti makanan, perumahan, dan pakaian. Kemiskinan absolute ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja (BPS, 2009: 12)

Konsep kemiskinan absolut didasarkan pada kekurangan material atau yang berhubungan dengan keuangan dan *“is generally measured by pricing the basic necessities of life, drawing a poverty line in terms of this price, and defining as poor those whose income falls below that figure”* (Haralambos dan Holborn 1991 dalam Serr, 2006: 52). Jadi kemiskinan absolut umumnya diukur dengan menetapkan harga kebutuhan dasar untuk hidup, membuat garis kemiskinan atas dasar harga tersebut, dan mendefinisikan orang sebagai miskin apabila pendapatannya berada di bawah garis tersebut.

Berbicara tentang kemiskinan absolut, mau tidak mau akan menyinggung tentang batas kemiskinan atau garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini merupakan sarana yang penting untuk mempromosikan penelitian-penelitian kemiskinan dan mengkomunikasikannya kepada pembuat kebijakan dan masyarakat umum, tetapi tidak bisa menggambarkan seluruh kompleksitas yang dihadapi oleh orang miskin dalam kehidupan mereka, faktor-faktor yang membuat mereka miskin dan hambatan-hambatan yang membuat mereka tetap miskin. (Saunders, 2005:49-50).

Selain kemiskinan absolut, definisi-definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli ada yang mengarah pada ‘kemiskinan relatif’. Lister menyebutnya sebagai kekurangan dan kemiskinan relatif (*relative poverty and deprivation*). Aspek relative disini menyangkut 2 (dua) hal, yaitu pertama, sifat komparatif yang dibuat, dimana esensi dari unsur komparatif kemiskinan relatif terletak pada ide untuk menilai apakah seseorang berada dalam kemiskinan relatif dalam hubungannya dengan orang lain pada titik yang sama dalam sejarah; dan kedua, sifat dari *human needs* itu sendiri. (Lister, 2004: 22-24)

Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan mungkin bisa dimasukkan sebagai definisi kemiskinan yang memunculkan aspek relative dari kemiskinan karena ada unsur komparatif. Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. (Suparlan, 1995: xi) Definisi kemiskinan dari Parsudi Suparlan sudah memasukkan aspek kehidupan moral dan rasa harga diri, yang sudah bukan lagi merupakan kebutuhan fisik dasar.

Definisi kemiskinan relative yang terkenal antara lain dari Townsend. Lister menyebutnya definisi relative alternative, karena Townsend memunculkan aspek *human needs* di luar aspek ekonomi. Townsend memulai studi kemiskinan di Inggris, lalu ia mengembangkan konsep deprivasi relative, yang kemudian direvisi oleh Mark dan Lansley, yang bertujuan

untuk memasukkan aspek-aspek deprivasi, mendefinisikan kemiskinan sebagai “*those who are excluded from social intercourse: the isolated, the invisible, the hidden and the overlooked*” (Townsend, 1984 dalam Serr, 2006: 57). Jadi mereka yang dikatakan miskin adalah mereka yang dikucilkan dari pergaulan: terisolasi, yang tak terlihat, tersembunyi dan diabaikan. Jadi disini terlihat bahwa kemiskinan melibatkan aspek *social exclusion*.

Kemiskinan ‘relatif’ yang dikembangkan oleh Townsend ini diartikulasikan paling lengkap dalam karya monumentalnya *Poverty in the United Kingdom*. Menurut definisi alternative ‘relatif’nya Townsend: (Lister, 2004: 21)

Individuals, families, and groups in the population can be said to be in poverty when they lack the resources to obtain the types of diet, participate in the activities and have the living conditions and amenities which are customary, or are at least widely encouraged or approved, in the societies to which they belong. Their resources are so seriously below those commanded by the average individual or family that they are, in effect, excluded from ordinary living patterns and activities.

Menurut Townsend, individu, keluarga, dan kelompok dalam populasi dapat dikatakan berada dalam kemiskinan ketika mereka kekurangan sumber daya untuk mendapatkan jenis makanan, berpartisipasi dalam kegiatan dan memiliki kondisi hidup dan fasilitas yang biasanya, atau setidaknya, secara luas didorong di dalam masyarakat di mana mereka berasal. Sumber daya mereka benar-benar di bawah yang dimiliki oleh rata-rata individu atau keluarga, sebagai akibatnya, mereka dikeluarkan dari pola hidup dan kegiatan yang biasanya.

Hal yang mendasari berbagai dimensi dari istilah kemiskinan relatif adalah pemahaman tentang kebutuhan manusia (*human needs*). Kalau diperhatikan definisi kemiskinannya

Townsend dapat kita lihat bahwa tidak hanya kebutuhan fisik dasar yang meliputi pangan, sandang dan papan, tetapi juga ada kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas sosial, kebutuhan untuk berelasi sosial. Beberapa definisi kemiskinan yang juga mengemukakan aspek lain selain kebutuhan fisik dasar yaitu yang dikemukakan oleh Komisi Eropa.

Demikian juga definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Adam Smith, *the founding father of the invisible hand of the market*, sejalan dengan yang dikemukakan Townsend dan Komisi Eropa. Smith dalam Saunders (2005: 58) mendefinisikan kemiskinan sebagai “*lack of necessities, where necessities include not only the commodities which are indispensably necessary for the support of life but whatever the custom renders it indecent for creditable people, even of the lower order, to be without*”. Kemiskinan, menurut Adam Smith adalah kurangnya kebutuhan dasar, di mana kebutuhan tidak hanya mencakup komoditi yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupannya tapi apapun adat kebiasaan yang menjadikannya tidak diterima oleh masyarakat.

Konsep kemiskinan Adam Smith ini terkait dengan *social exclusion*. Penekanan Smith tentang ‘*whatever the custom renders it indecent for creditable people, even of the lower order; to be without*’ sejalan dengan yang dikemukakan Townsend dan Komisi Eropa, bahwa kemiskinan bukan saja tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup tetapi juga, tetapi juga tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang ditentukan sosial, yang akhirnya membuat orang miskin itu diacuhkan oleh masyarakat. Dalam tulisannya yang lain, Smith dalam Arthur (2008) mengemukakan:

The poor man ... is ashamed of his poverty. He feels that it either places him out of the sight of

mankind, or, that if they take any notice of him, they have, however, scarce any fellow-feeling with the misery and distress which he suffers... The poor man goes out and comes in unheeded, and when in the midst of a crowd is in the same obscurity as if shut up in his own hovel.

Menurut Smith, orang miskin itu malu akan kemiskinannya. Ia merasa bahwa ia diabaikan oleh orang lain. Bahkan ketika ia berada dalam kerumunanpun, ia merasakan hal yang sama seperti ketika ia berdiam diri di dalam gubuknya sendiri.

Microfinance sebagai Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Microfinance merupakan salah satu strategi yang penting dan dianggap berhasil didalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Hamdani: 2012;). Penelitian Hamdani dan kawan-kawan (2012) di Pakistan, dengan mengambil sampel 350 orang, menunjukkan bahwa *microfinance* mempunyai pengaruh atau dampak yang besar terhadap mobilitas sosial, dan ada hubungan positif antara *microfinance* dengan mobilitas sosial. Penelitian Appah dan kawan-kawan di Nigeria (2012) dengan mengambil sampel sebanyak 286 orang, juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara *microfinance* dan pengentasan kemiskinan di negara bagian Bayelsa.

Berbicara tentang *microfinance* atau keuangan mikro, biasanya tidak lepas dari *microcredit* atau kredit mikro. Yunus dan Jolis (1998) dalam Rajouria (2008) mengemukakan bahwa *micro-finance programs carry out financial services such as microcredit, micro-savings, transfer payment services and micro-insurance*. Jadi program-program keuangan mikro menyelenggarakan pelayanan-pelayanan keuangan seperti kredit mikro, tabungan mikro, pelayanan pembayaran transfer, dan

jaminan mikro. Jadi dari uraian tersebut bisa dikemukakan bahwa *microcredit* merupakan bagian dari *microfinance*.

Memang *microfinance* (keuangan mikro) dan *microcredit* (kredit mikro) telah diakui oleh banyak pihak sebagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus sebagai upaya pemberdayaan (Roxin et. al: 2010). Hasil penelitian Roxin et.al (2010) menunjukkan bahwa kredit mikro mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di Sierra Leone, dan mempunyai pengaruh awal terhadap pemberdayaan sosialnya. Hasil penelitian Uddin (2011) juga menunjukkan bahwa kredit mikro memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial-ekonomi di Hakaluki, khususnya dalam peningkatan pendapatan rumah tangga, diversifikasi mata pencaharian, penciptaan wirausaha, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan di Hakaluki Haor.

Meskipun ada juga beberapa penelitian yang menemukan bahwa kredit mikro hanya memiliki dampak yang minimal dalam menurunkan angka kemiskinan sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian Haque (2004) atau yang dikemukakan oleh Ashta dan Fall (2012: 441) bahwa di beberapa Negara keuangan mikro ini berhasil seperti di Bangladesh dan Maroko, tetapi di beberapa Negara lainnya gagal seperti di Libya dan Afghanistan. Namun demikian hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *microcredit* dan *microfinance* ini berhasil dalam mengentaskan kemiskinan lebih banyak dibandingkan dengan penelitian yang menunjukkan kegagalan. Hal ini menunjukkan bahwa *microcredit* dan *microfinance* memang merupakan upaya yang bisa diandalkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Keuangan mikro (*microfinance*) dipandang sebagai mekanisme yang berkelanjutan dalam

menanggulangi kemiskinan, sebagaimana dikemukakan oleh Hamdani (2012) bahwa "*Microfinance is thus perceived to be a sustainable mechanism to fight poverty. Small enterprises play an important role in the economic and social development*". Menurut Hamdani, keuangan mikro merupakan mekanisme yang berkelanjutan untuk memerangi kemiskinan, dan usaha kecil memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Kredit mikro (*microcredit*) dan keuangan mikro (*microfinance*) merupakan dua istilah yang seringkali digunakan secara bersamaan, walaupun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Perbedaan diantara keduanya dapat dilihat dalam kutipan berikut:

"Micro-credit refers to lending small amounts of money on a short-term basis to poor people for consumption and investment, generally without collateral. Micro-credit programs focus only on providing small loans to the clients and do not take deposits from them. Micro-finance programs, on the other hand, are broader in scope of activities and incorporate both lending as well as mobilizing saving deposits of the clients ("What is Microcredit," 2004 dalam Rajouria: 2008).

Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa kredit mikro mengacu pada pinjaman dalam jumlah kecil atas dasar jangka pendek bagi masyarakat miskin untuk konsumsi dan investasi, umumnya tanpa jaminan. Program kredit mikro hanya terfokus pada penyediaan pinjaman dalam jumlah kecil kepada klien dan tidak ada simpanan tabungan dari mereka. Sementara program-program *microfinance*, lebih luas cakupan aktivitasnya dan didalamnya ada pinjaman sekaligus juga memobilisasi simpanan tabungan dari klien. ("*What is Microcredit,*" 2004 dalam Rajouria: 2008)

Sementara itu Yunus dan Jolis (1998) dalam Rajouria (2008) mengemukakan bahwa *micro-finance programs carry out*

financial services such as microcredit, micro-savings, transfer payment services and micro-insurance. Jadi program-program keuangan mikro menyelenggarakan pelayanan-pelayanan keuangan seperti kredit mikro, tabungan mikro, pelayanan pembayaran transfer, dan jaminan mikro.

Sementara The Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan keuangan mikro (*micro-finance*) sebagai “*the provision of a broad range of financial services such as deposits, loans, payment services, money transfers and insurance to poor and low-income households and their microenterprises*” (“*Microfinance: Financial Services for the Poor,*” 2007 dalam Rajouria: 2008). Jadi yang dimaksud dengan keuangan mikro adalah penyediaan pelayanan keuangan seperti deposito, pinjaman, pelayanan pembayaran, transfer uang dan jaminan bagi masyarakat miskin dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Sedangkan *microcredit* yang disediakan oleh Grameen Bank dan lembaga pinjaman lainnya yang sejenis memiliki 5 ciri yang membedakannya dari kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional:

1. Pinjamannya kecil, sekitar \$100 (sekitar 1 juta rupiah), tergantung pada tingkat perkembangan sosial ekonomi masing-masing Negara.
2. Nasabah utamanya adalah orang miskin di pedesaan, khususnya perempuan, yang kurang memiliki akses terhadap fasilitas perbankan konvensional
3. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk menciptakan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan pendapatan di sector non formal pedesaan melalui wirausaha
4. Tidak memerlukan jaminan untuk mendapatkan pinjaman ini
5. Usaha kredit mikro memiliki fungsi

mengintegrasikan pinjaman dan mobilisasi tabungan. Tabungan dengan lembaga pinjaman bukan persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dari bank konvensional (Elahi, 2004: 62)

Gagasan *microcredit* yang memenuhi kebutuhan orang miskin untuk mendapatkan pinjaman kecil melalui perorangan, setua sejarah kemanusiaan. Tetapi ada beberapa ciri yang membedakan gerakan *microcredit* saat ini dengan fasilitas kredit informal tradisional:

1. Gerakan *microcredit* merupakan pendekatan *Non Government Organizations* (NGOs) dalam mengentaskan kemiskinan. NGOs merupakan organisasi sukarela yang didasarkan pada nilai tidak mencari keuntungan (*non-profit*) dan bekerja di seluruh dunia selama berabad-abad di terutama di Negara-negara berkembang di Selatan. Tidak seperti lembaga-lembaga kredit informal tradisional, NGOs tidak memiliki motif mencari keuntungan
2. Gerakan *microcredit* bersifat ‘tidak menghakimi’. Selama bertahun-tahun organisasi sosial membantu orang miskin dengan pinjaman kecil dengan asumsi bahwa mereka miskin karena kegagalan pribadi mereka. Pendekatan NGOs berbeda dengan teori kegagalan pribadi, karena dipercaya bahwa kemiskinan tercipta melalui proses sosial, yang mengurangi akses orang miskin terhadap sumber-sumber sosial. Salah satu sumber tersebut adalah kredit, dimana tokoh *microcredit* menganggapnya sebagai hak sasi manusia.
3. Tokoh *microcredit* percaya bahwa mereka dapat menginspirasi revolusi sosial dan ekonomi di Negara-negara Dunia Ketiga, dengan mengorganisir orang miskin dibawah naungan organisasi *microcredit* jenis Grameen. (Elahi, 2004: 63)

Prof. Yunus, pendiri Grameen Bank, melihat sistem perbankan tradisional dan memutuskan

bahwa organisasinya akan melakukan suatu dengan cara yang berbeda:

Banks lend to the rich; we lend to the poorest. Banks demands collateral; we do not. Banks ask for signed papers; we do not, most poor people can neither read nor write. We trust in their world. Banks wait for the client to go to them; we go to them, to where they live and work, and so on. And the rate of performance for a micro-credit institution is the envy of any traditional bank. (Dias dan Monteiro, 2011: 70)

Menurut Prof. Yunus, bank memberi pinjaman kepada orang kaya, grameen bank memberikan pinjaman kepada termiskin; bank menuntut agunan, grameen bank tidak; bank meminta kertas yang ditandatangani, grameen bank tidak, karena kebanyakan orang miskin tidak dapat membaca ataupun menulis; bank menunggu klien untuk pergi kepada mereka, grameen bank pergi ke mereka, di mana mereka tinggal dan bekerja, dan sebagainya; dan tingkat kinerja lembaga kredit mikro membuat iri setiap bank tradisional.

Menurut koresponden New York Times, Celia Dugger, program ekonomi Prof. Yunus bisa dikualifikasikan sebagai kontribusi sejati terhadap perdamaian karena *microcredit* dapat memberdayakan perempuan; *microcredit* menawarkan harapan, menawarkan pemberdayaan perempuan. Sangat banyak pinjaman kredit mikro ini diberikan kepada perempuan yang sama sekali tidak berdaya (*powerless*) secara keuangan di dalam keluarga mereka. Mereka seringkali tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta, mereka tidak memiliki rekening bank atas nama mereka sendiri. Jadi fakta bahwa perempuan memiliki *power* untuk mendapatkan pinjaman, bahkan pinjaman yang sangat kecil sekalipun, dapat menjadi sangat penting dalam memberikan *power* terhadap perempuan. (Selinger, 2008: 28)

Secara mendasar visi dan tujuan Grameen Bank tidak hanya menyediakan *financial*

capital bagi para peminjam agar mereka dapat meningkatkan kondisi ekonominya, tetapi juga memajukan *social development*. (Fuglesang dan Chandler dalam Choudhary, 2009: 5) Pada tingkat yang mendasar, *peer-monitoring*, model penyaluran kredit berbasis kelompok tergantung pada *trust* dan *solidarity* di antara penduduk desa dan dapat mengisi kesenjangan kritis dalam struktursosial dan keuangan suatu masyarakat. (Choudary, 2009: 6)

Dipelopori oleh lembaga keuangan di Bangladesh, Bolivia, dan Indonesia, bank-bank pedesaan dimulai oleh *the Foundation for International Community Assistance, microfinance* membantu individu-individu yang diabaikan oleh sector perbankan formal. Lembaga *microfinance* memiliki komitmen untuk mengurangi kemiskinan dengan menyediakan layanan keuangan bagi individu dan rumah tangga berpenghasilan rendah. (Weil, 2013: 620)

Meskipun pengentasan kemiskinan melalui penyediaan kredit bersubsidi bukanlah hal baru, *microfinance* telah dianggap sebagai cara yang inovatif untuk menanggulangi kemiskinan karena pendekatannya yang khas, yang secara radikal berbeda dengan yang digunakan oleh lembaga keuangan yang menjadi *mainstream*. Mekanismenya antara lain kontrak kelompok peminjam (melalui *peer selection*, monitoring, dan *self-help group*), insentif yang dinamis, jadwal pengembalian secara rutin, dan pengganti agunan untuk mempertahankan tingkat pengembalian yang tinggi. (Weil, 2013: 620)

Intervensi *microfinance* memiliki dampak yang amat penting terutama jika intervensinya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. Jika para praktisi *microfinance* tidak membuat upaya-upaya untuk menentukan siapa yang dijangkau oleh pelayanan *microfinance*

serta bagaimana pelayanan *microfinance* ini mempengaruhi kehidupan mereka, maka sulit untuk membenarkan bahwa *microfinance* merupakan alat untuk mengurangi kemiskinan. (Ledgerwood, 1999: 46)

Microfinance muncul sebagai pendekatan pembangunan ekonomi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik laki-laki maupun perempuan. *Microfinance* menyediakan layanan keuangan. Layanan keuangan disini meliputi tabungan dan kredit; namun demikian beberapa lembaga *microfinance* juga menyediakan asuransi dan layanan pembayaran. Selain memberikan layanan *economic intermediation*, banyak lembaga *microfinance* yang juga menyediakan layanan *social intermediation* seperti pembentukan kelompok, pengembangan rasa percaya diri, pelatihan-pelatihan dalam kemampuan manajemen dan keuangan diantara anggota kelompok. Jadi *microfinance* bukan sekedar bank, tetapi juga merupakan alat pembangunan (Ledgerwood, 1999: 1)

Kegiatan *microfinance* biasanya meliputi:

- Pinjaman kecil, terutama untuk modal kerja
- Penilaian informal terhadap peminjam dan investor
- Agunan, seperti jaminan kelompok atau simpanan sukarela
- Akses untuk meminjam kembali, yang didasarkan atas kelancaran pengembalian pinjaman sebelumnya
- Penyaluran dan pemantauan kredit secara efisien
- Produk tabungan aman (Ledgerwood, 1999: 1)

Lembaga *microfinance* bisa berupa *Non Government Organizations* (NGO), koperasi simpan pinjam, koperasi kredit, bank-bank pemerintah, bank-bank komersial, ataupun

lembaga-lembaga non-bank. Klien-klien *microfinance* umumnya pengusaha kecil, petani kecil, penyedia layanan jasa pangkas rambut, tukang becak (Ledgerwood, 1999: 2)

Microfinance muncul pada tahun 1980-an sebagai respons terhadap keraguan dan temuan penelitian tentang pemberian subsidi kredit bersubsidi kepada petani miskin. Pada tahun 1970-an lembaga-lembaga pemerintah merupakan metode utama untuk memberikan kredit produk kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas kredit (Ledgerwood, 1999: 2)

Pemerintah dan donor internasional berasumsi bahwa masyarakat miskin memerlukan kredit murah dan melihatnya sebagai cara untuk meningkatkan produksi pertanian dari petani kecil. Selain itu untuk memberikan kredit pertanian bersubsidi, donor merancang koperasi kredit yang terinspirasi dari model Raiffeisen yang dikembangkan di Jerman pada tahun 1864. Fokus dari lembaga keuangan koperasi ini terutama yaitu pada mobilisasi tabungan di daerah pedesaan dan berusaha untuk menjangkau petani miskin bagaimana agar bisa menabung (Ledgerwood, 1999: 2)

Microfinance hingga saat ini berkembang sedemikian rupa karena berbagai alasan:

- *The promise of reaching the poor*; Kegiatan *microfinance* dapat mendukung peningkatan penghasilan bagi usaha-usaha yang dijalankan rumah tangga berpenghasilan rendah.
- *The promise of financial sustainability*; kegiatan *microfinance* dapat membantu membangun kemandirian secara ekonomi, bebas subsidi, yang seringkali merupakan lembaga yang dikelola secara lokal.
- *The potential to build on traditional system*; kegiatan *microfinance* seringkali meniru sistem tradisional (seperti arisan).

Mereka memberikan layanan dengan cara yang sama, tetapi sangat fleksibel, dengan harga yang lebih terjangkau bagi perusahaan dan secara lebih berkelanjutan. Hal ini menjadikan *microfinance* sangat menarik bagi sebagian besar klien yang berpenghasilan rendah.

- *The contribution of microfinance to strengthening and expanding existing formal financial system*; kegiatan *microfinance* dapat memperkuat lembaga keuangan yang ada, seperti koperasi simpan pinjam, jaringan koperasi kredit, bank-bank komersial.
- *The growing number of success stories*; meningkatnya jumlah orang-orang yang sukses, yang terdokumentasikan dengan baik, seperti di Bangladesh, Bolivia dan Mali.
- *The availability of better financial products as a result of experimentation and innovation*; inovasi yang diperlihatkan memecahkan masalah kurangnya jaminan dengan menggunakan pendekatan berbasis kelompok atau pendekatan berbasis karakter (Ledgerwood, 1999: 3)

Di dalam kerangka sistem ada 4 (empat) kategori layanan yang bisa disediakan bagi klien *microfinance*:

- *Financial intermediaries*, atau penyediaan produk dan layanan finansial seperti tabungan, kredit, asuransi, *credit card*, dan sistem pembayaran.
- *Social intermediation*, atau proses membangun modal sosial dan modal manusia yang diperlukan bagi *financial intermediation* dengan harga yang lebih terjangkau bagi perusahaan dan secara lebih berkelanjutan bagi orang miskin
- *Enterprise development services*, atau layanan non finansial yang membantu pengusaha. Dalam hal ini mencakup pelatihan kewirausahaan, layanan

pemasaran dan teknologi, pengembangan keterampilan.

- *Social services*, atau layanan non finansial yang fokus pada kesejahteraan pengusaha, yang mencakup kesehatan, gizi, pendidikan dan pelatihan membaca. Layanan sosial ini memerlukan subsidi baik dari pemerintah maupun dari donor yang mendukung NGO (Ledgerwood, 1999: 64-65)

Sejauh mana lembaga keuangan mikro dapat menyediakan layanan-layanan ini tergantung pada apakah lembaga *microfinance* tersebut mengambil pendekatan *minimalist* atau *integrated*. Bila lembaga *microfinance* tersebut hanya menyediakan layanan finansial saja, maka bisa dikatakan bahwa lembaga *microfinance* tersebut mengambil pendekatan *minimalist*. Sedangkan bila lembaga *microfinance* tersebut tidak hanya menyediakan layanan finansial tetapi juga menyediakan layanan-layanan lainnya, maka lembaga *microfinance* tersebut berarti mengambil pendekatan *integrated* (Ledgerwood, 1999: 65)

Menurut Ledgerwood, sebagai program pemberdayaan, kegiatan *microfinance* memiliki dampak yang luas, dan umumnya meliputi 3 hal yaitu: 1) ekonomi; 2) sosial politik atau budaya; 3) personal atau psikologis. Terkait dampak ekonomi yang diharapkan dari kegiatan *microfinance* yaitu: 1) Adanya perluasan usaha; 2) Masyarakat bisa mendapatkan pendapatan dari subsector ekonomi informal; 3) Terjadinya akumulasi kekayaan pada tingkat masyarakat atau keluarga; 4) Adanya sumber ekonomi “perlindungan” untuk mengurangi kerentanan orang miskin (Ledgerwood, 1999: 47)

Adapun dampak sosial politik atau budaya yang diharapkan dengan adanya kegiatan *microfinance* yaitu: 1) Dengan diberikannya kredit bagi mereka yang bergerak di sektor informal diharapkan mereka dapat bergerak

secara kolektif kearah status yang lebih formal dengan membentuk asosiasi seperti asosiasi tukang becak misalnya atau yang memungkinkan mereka untuk mengubah kebijakan yang lebih menguntungkan mereka; 2) Program *microfinance* di daerah pedesaan yang terpencil diharapkan bisa mengubah system barter yang selama ini dijalankan masyarakat kearah sistem ekonomi mener; 3) Terjadinya perubahan relasi kekuasaan dan status; 4) Terjadinya redistribusi asset dan *power* atau pengambilan keputusan pada tingkat rumah tangga, contohnya berubahnya sebagian pengambilan keputusan ekonomi dari laki-laki kepada perempuan; 5) Terjadinya perubahan dalam hal pendidikan dan gizi anak (Ledgerwood, 1999: 47-48)

Sedangkan dampak personal atau psikologis yang diharapkan dengan adanya kegiatan *microfinance* yaitu bahwa *microfinance* diharapkan memiliki dampak terhadap diri peminjam itu sendiri. Pertama, peminjam diharapkan menjadi memiliki *power* yang lebih besar baik di dalam rumah tangga atau di masyarakat dibandingkan dengan sebelum mengikuti kegiatan *microfinance*. Kedua, diharapkan terjadi perubahan pandangan yang lebih positif terhadap dirinya sendiri, sehingga mereka menjadi lebih siap terhadap perubahan yang lain. Contohnya mereka menjadi lebih percaya diri, sehingga lebih siap untuk memulai atau mengembangkan usaha (Ledgerwood, 1999: 48)

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah global, yang dihadapi oleh Negara-negara di dunia. Kemiskinan merupakan konsep yang kompleks dan multi interpretasi, bukan hanya merupakan konsep ekonomi, tetapi juga merupakan konsep politik. Berdasarkan

hasil penelitian di beberapa Negara terbukti bahwa keuangan mikro merupakan upaya yang dipandang berhasil dalam mengentaskan kemiskinan. Bahkan, keuangan mikro ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga merupakan upaya pemberdayaan bagi orang miskin. Sebagai program pemberdayaan, kegiatan keuangan mikro memiliki dampak yang luas, yang umumnya meliputi 3 aspek yaitu: aspek ekonomi; aspek sosial politik atau budaya; serta aspek personal atau psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Appah, Ebimobowei; M. Sophia John and Soreh Wisdom. (2012, Maret). "An Analysis of Microfinance and Poverty Reduction in Bayelsa State of Nigeria". *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review* Vol. 1, No. 7; March 2012 page 38-57. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/1266941883/fulltextPDF/1433E035D3857001802/9?accountid=17242>.
- Athur, Don. (2008, 22 Juni). *What if Adam Smith was right about poverty?* diakses pada tanggal 13 Juni 2014 pukul 22. 50 dari <http://clubtrollo.com.au/2008/06/22/what-if-adam-smith-was-right-about-poverty/>.
- Ashta, Arvind and Ndeye Salimata Fall. (2012). "Institutional Analysis to Understand the Growth of Microfinance Institutions in West African Economic and Monetary Union". *Corporate Governance* Vol. 12 No. 4, 2012, pp. 441-459, Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1472-0701. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/1095508793/fulltextPDF/14342814335247FAD82/4?accountid=17242>.

- Badan Pusat Statistik. (2009). *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Choudhary, Asma Sana. (2009). "Development as social transformation: Assessing the value of social capital in microfinance and its role in the success of the Grameen Bank". Thesis. Villanova University. Diakses dari <http://search.proquest.com/docview/305009510/CD9E485BE19149B5PQ/2?accountid=17242>.
- Dias, Janeiro Ana dan Eugenio Viassa Monteiro. (2011). "The Grameen Bank: Credit as a Human Right". *EFMD Global Focus*. Volume 05, Issue No. 1, 2011. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/863260271/fulltextPD/4851A4AF3135480APQ/14?accountid=17242>.
- Elahi, Khandakar Q. dan Constatine D. Danopoulos. (2004). "Microfinance and Third World Development: A Critical Analysis". *Journal of Political and Military Sociology*; Summer 2004; Vol. 32, Nomor 1. Page 61-77 diakses dari <http://search.proquest.com/docview/206656305/fulltextPDF/37D3FEE63F9E45EAPQ/67?accountid=17242>.
- Hamdani, Syed Muhammad Qasim and Hummayoun Naeem. (2012, Desember). "The Impact of Microfinance on Social Mobility, an Empirical Evidence from Pakistan". *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research Business*, Desember 2012, Vol. 3 No. 9, page 81-89. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/964018217/fulltextPDF/1433E035D3857001802/5?accountid=17242>.
- Haque, Mohammed Ashraful and James L. Harbin. (2009). "Micro Credit A Different Approach to Traditional Banking: Empowering the Poor". *Academy of Banking Studies Journal*, Volume 8, Number 1, 2009. diakses pada tanggal 29 Januari 2014 dari <http://search.proquest.com/docview/215112255/fulltextPDF/14342AE64A1E16A4E2/4?accountid=17242>.
- Ife, Jim. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Ledgerwood, Joanna. (1999). *Sustainable Banking with the Poor: Microfinance Handbook an Institutional and Financial Perspective*. Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Lister, Ruth. 2010. *Poverty*. Cambridge: Polity Press.
- Rajouria, Alok. (2008). "Micro-Finance and Empowerment of Women: Evidence from Nepal". Dissertation. University of Hawai'i. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/304603612/fulltextPDF/1431858B95E68336FA7/1?accountid=17242>.
- Roxin, Helge et. al. "Economic Empowerment of Women through Microcredit: the Case of the Microfinance Investment and Technical Assistance Facility (MITAF)". *SLE Publication Series-S240*. diakses dari <http://edoc.hu-berlin.de/series/sle/240/PDF/240.pdf>.

- Saunders, Peter. (2005). *The Poverty Wars*. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.
- Selinger, Evan. (2008). "Does Microcredit 'Empower'? Reflections on the Grameen Bank Debate". *Hum Stud* (2008) 31:27–41. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/219267427/fulltextPDF/4851A4AF3135480APQ/23?accountid=17242>.
- Serr, Klaus (editor). (2006). *Thinking About Poverty*. Third Edition. Sydney: The Federation Press.
- Suparlan, Parsudi (Penyunting). (1995). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Uddin, Mohammed Salim. (2011). "Role of Microcredit Role of Microcredit and Community-Based Organizations in a Wetland Area in Bangladesh". *Thesis*. The University of Manitoba. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/1030793486/fulltextPDF/14342B7404BE16A4E2/4?accountid=17242>.
- Weil, Marie. Michael Reisch dan Mary L. Ohmer (Editor). (2013). *The Handbook of Community Practice*. USA: SAGE Publications, Inc.